

## DAFTAR PUSTAKA

<http://www.pajakonline.com>

Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003. M02.Um.09.01 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Dirumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-459/PJ/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/PMK.04/2000 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mardiasmo, 2011, **Perpajakan**. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

PMK Nomor 23/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Atas KMK Nomor 85/KMK.02/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

PMK Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksana Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

PP Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

PP Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

PP Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Resmi, Siti, 2009. **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Jakarta. Salemba Empat.

Suandy, Erly, 2011. **Hukum Pajak**. Edisi 5. Yogyakarta: Salemba Empat

Sulistyaningsih, Ernawati. **Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di KPP Pratama Surakarta**. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Supramono, 2010. **Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan**. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.75/2000 Tentang Tata Cara Penerbitan Ulang Surat Teguran, Penerbitan Surat Paksa Pengganti, dan Pembetulan atau Penggantian Surat-surat Dalam Rangka Penagihan Surat Pajak.

Waluyo, 2010. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.

[www.ortax.org](http://www.ortax.org)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



MERCU BUANA  
YOGYAKARTA